

JURNAL KOMUNIKASI

Volume 3, Nomor 1, Oktober 2008

ISSN 1907-848X

Halaman 1 - 114

DAFTAR ISI

KONGLOMERASI DAN DINAMIKA EKONOMI POLITIK MEDIA

Editorial

**Konglomerasi Media dan Konstruksi Praksis Demokrasi
Pasca Rezim Orde Baru: Sebuah Refleksi Awal**

Nyarwi
(01 - 14)

**Analisis Konglomerasi Industri Pers Daerah di Indonesia:
Pendekatan S-C-P**

Iwan Awaluddin Yusuf
(15 - 32)

**Negotiating Mass Media Interest and
Heterogeneous Muslim Audience
in the Contemporary Social-Political Environment of Indonesia**

Ishadi S.K.
(33 - 52)

**Industri Perfilman Bollywood:
Evolusi Hiburan di Tengah Kemiskinan**

Selvy Widuhung
(53 - 70)

**Analisis Framing Berita Meninggalnya Mantan Presiden Soeharto
di Majalah *Tempo* dan *Gatra***

Nur Indah Yogadiasti - Muzayin Nazaruddin
(71 - 84)

**Ideologi Islam dalam Kebijakan Redaksional Harian Umum *Republika*:
Analisis Wacana Kritis tentang Pemberitaan Konflik PKB dan Film *Fitna***

M. Exsa Firmansyah
(85 - 100)

**Analisis Model Produksi Berita Televisi Lokal:
Studi *TVRI Stasiun Penyiaran Kalimantan Selatan* dan *Banjar TV***

Hesti Dwi Yulianti - Masduki
(101 - 114)

Ideologi Islam dalam Kebijakan Redaksional Harian Umum *Republika*: Analisis Wacana Kritis tentang Pemberitaan Konflik PKB dan Film *Fitna*

***M. Exsa Firmansyah*¹**

Abstract

This research focus on Islamic ideology in the redactional policy, that was one of the internal factor when creating a Republika news product towards PKB conflict, Ahmadiyah cult and Fitna controversy. The analysis of content at PKB's conflict was shown Republika's neutral display. Its neutral display was shown by the theme, the option of people who was being the source. While, at the Fairclough text analysis, Republika was shown the negative effect from that conflict which didn't have the good effect for two sides, but could bring the negative effect for the party. For the news of Ahmadiyah, the content analysis was shown Republika's position as one side which against Ahmadiyah with used perception that Ahmadiyah is untrue side. From the research the researcher done, there's a conclusion that islamic ideology in the Republika redactional policy, can be categorized as the form of conservative Islamic ideology.

Keywords :

Ideology, Redactional Policy, Conservative Islamic

Pendahuluan

Media massa merupakan sumber informasi masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap pencitraan masyarakat dalam menanggapi sebuah fenomena. Media mempunyai kekuatan penuh dalam menentukan pencitraan yang ada lewat proses filtrasi informasi, yakni penentuan keputusan informasi apa saja yang diterbitkan dan diketahui oleh masyarakat. Kondisi ini menempatkan media sebagai pembentuk citra baru bagi masyarakat.

Dalam dunia pencitraan, citra dan realitas menjadi dua kutub yang terus tarik menarik. Citra telah berubah menjadi sebuah mesin politis yang bergerak kian cepat. Strategi pencitraan dan teknologi pencitraan atau imagologi dikemas sedemikian rupa untuk mempengaruhi persepsi, emosi, perasaan, kesadaran, dan opini publik sehingga mereka dapat digiring ke sebuah preferensi, pilihan dan keputusan politik tertentu.

Pengaruh ideologi telah menjadi kental dalam setiap detil pemberitaan surat kabar. Kalau kita mencermati surat kabar di Indonesia saat ini, ada beberapa latar belakang ideologi yang diusung oleh beberapa surat kabar nasional, khususnya ideologi

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII, menyelesaikan studi pada tahun 2008

dengan unsur agama. Di antaranya KOMPAS dengan ideologi nasraninya dan *REPUBLIKA* dengan ideologi Islamnya.²

Dalam menghasilkan produk pemberitaan, surat kabar dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kebijakan redaksional, kepentingan politik para pengelola media, dan pengaruh para relasi media yang ditanggung kekuatan politik tertentu, sedangkan faktor eksternal antara lain tekanan pasar pembaca, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan lainnya.³

Penelitian ini mencoba menguak kebijakan redaksional yang merupakan salah satu faktor internal pembentukan produk pemberitaan surat kabar. Sebagai subjek penelitian, peneliti memilih *REPUBLIKA* yang berideologi Islami. Dalam hal ini *REPUBLIKA* yang mempunyai visi sebagai koran umat (Islam) yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas, dan profesional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan pemahaman *Rahmatan Lil Alamin*,⁴ mempunyai aspek yang menarik untuk diteliti perihal pengambilan kebijakan redaksional terkait pemberitaan-pemberitaan seputar dunia keislaman.

Untuk itu, penelitian ini mencoba mengkaji perihal corak nuansa ideologi Islam yang diusung *HU REPUBLIKA* dalam kebijakan redaksional terkait pemberitaan konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terbitan 28 Maret-10 Mei 2008, aliran Ahmadiyah terbitan 10 April-16 Mei 2008, dan kontroversi film *Fitna* terbitan 23 Maret-8 April 2008.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan, dan merefleksikan nuansa ideologi Islam dalam kebijakan redaksional *Harian Umum REPUBLIKA* dalam pemberitaan konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terbitan 28 Maret-10 Mei 2008, aliran Ahmadiyah terbitan 10 April-16 Mei 2008, dan kontroversi film *Fitna* terbitan 23 Maret-8 April 2008.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan ilmu komunikasi, terutama kajian pencitraan ideologi dalam kebijakan redaksional, sehingga menjadi tolak ukur bagi *HU REPUBLIKA* terkait pencitraan ideologi Islamnya, dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian mengenai kajian wacana kritis, terutama mengenai kajian wacana kritis media cetak, oleh peneliti-peneliti lain.

Tinjauan Pustaka

a. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang menjadi referensi bagi peneliti adalah penelitian tentang manajemen redaksional media cetak oleh Jiun, mahasiswa Universitas Kristen Petra pada tahun 2005.⁵

² Dandi Aditya, *Studi Ideologi Media*, <http://digilib.itb.ac.id>, diakses pada 14 Mei 2008.

³ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa; Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik* (Jakarta: Granit, 2004), hal 2-3.

⁴ Profile Company, www.republika.co.id, diakses pada 25 November 2007.

⁵ Penelitian Jiun, *Kenaikan Harga BBM dalam kemasan Jawa Pos dan Kompas*, <http://digilib.petra.ac.id>, diakses pada 2 Mei 2008

Penelitian ini mengkaji dan membandingkan pemberitaan kenaikan BBM di dua media cetak, sebagai subjek penelitian tersebut. Berita kenaikan BBM yang dianalisis pada dua media cetak diambil dari berita halaman pertama dan kedua merupakan berita langsung atau *straight news*. Kesimpulan yang di peroleh menunjukkan kebijakan redaksional media cetak terkait dengan situasi politik Indonesia.

b. Kebijakan Redaksional

Kebijakan redaksional sebuah media massa muncul dari keputusan-keputusan manajemen redaksional, dan dilatarbelakangi motif politik, ekonomi, agama dan sebagainya. Hal ini menjadikan media massa sebagai tempat berkumpulnya organisasi-organisasi dan individu dengan segala kepentingan bahkan saling bertentangan.

Kepentingan media massa mempengaruhi berita yang disampaikan kepada khalayak. Dari sini muncullah anggapan bahwa fakta yang disampaikan bukanlah fakta objektif, tetapi fakta yang telah dikonstruksi oleh media dengan latar belakang kepentingan tertentu.

Kebijakan redaksional tiap pemberitaan menjadi sebuah ideologi dasar bagi seluruh kegiatan jurnalistik. Kebijakan ini merupakan hak prerogatif pengelola media. Tujuan dari suatu kebijakan redaksional sangat ditentukan apakah diarahkan untuk suatu keberpihakan atau bertujuan mempertahankan dan mengembangkan pembaca. Menurut Pareno⁶, ketika membaca berita atau artikel sebuah media cetak dapat dipastikan ada pesan terselubung, yaitu opini dari redaktur media yang bersangkutan. Ke mana arah opini dalam berbagai berita dibentuk, itulah salah satu contoh sederhana sebuah kebijakan redaksional media.

c. Ideologi Islam

Secara umum ideologi mempunyai dua pengertian yang berbeda. Pengertian dalam tataran positif menyatakan bahwa ideologi dipersepsikan sebagai realitas pandangan dunia (*world-view, weltanschauung*) yang menyatakan sistem nilai kelompok atau komunitas sosial tertentu untuk melegitimasi kepentingannya. Sedangkan pengertian dalam tataran negatif menyatakan bahwa ideologi dipersepsikan sebagai realitas kesadaran palsu. Dalam arti, bahwa ideologi merupakan sarana manipulatif dan *deceptive* pemahaman manusia mengenai realitas sosial.

Islam adalah *din* yang lengkap dan sempurna.⁷ Sebagai *din*, Islam bukan hanya membahas masalah keakhiratan, tapi, Islam juga membahas berbagai masalah keduniaan, seperti pemerintahan, ekonomi, politik, sosial-kemasyarakatan dan sebagainya, yang lazimnya menjadi wilayah ideologi. Karena itu, bisa disimpulkan, bahwa Islam adalah agama sekaligus ideologi. Menurut Yusuf Qardhawi, ideologi Islam dipahami sebagai pedoman di seluruh lapangan kehidupan, material dan spiritual.⁸ Lebih lanjut, seperti dikatakan John Obert Voll, ideologi Islam terbagi dalam empat

⁶ Pareno, Sam Abede, *Manajemen Berita: Antara Idealisme dan Realita* (Surabaya: Papyrus, 2003), hal 93. 9

⁷ Al Qur'an, Surah Al Maaidah ayat 3

⁸ Yusuf Qardhawi, *Kerangka Ideologi Islam* (Bandung: Risalah, 1985), hal 33.

bentuk tindakan yang memberikan kerangka pada kelangsungan interaksi⁹, yaitu bentuk adaptasionis, konservatif, fundamentalis, dan menempatkan tekanan pada aspek personal (individual).

d. Hubungan Ideologi dengan Media Massa

Dalam perspektif Althusser, hubungan ideologi dengan media massa dijelaskan dalam empat kategori. Hubungan yang pertama menyatakan bahwa media dalam konteks ideologi modern akan banyak berperan sebagai *ideological state apparatus*. Hubungan kedua adalah media massa mampu melakukan proses interpelasi ideologi. Untuk hubungan yang ketiga adalah media massa atau teks media mampu menjadi instrumen efektif-efisien bagaimana nilai atau wacana dominan didistribusikan dan dipenetrasi dalam benak orang sehingga bisa menjadi konsensus kolektif. Sedangkan hubungan keempat dalam perkembangan media modern, media justru juga mempunyai ideologi dan praksis hegemoni.¹⁰

Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Dalam hal ini, penelitian dilakukan berdasarkan pada bagaimana berita-berita yang dianalisis dalam penelitian ini diproduksi, dan bagaimana kedudukan wartawan HU *REPUBLIKA* dalam keseluruhan proses produksi berita.

Penelitian ini berusaha mengkaji pencitraan nuansa keislaman HU *REPUBLIKA* lewat kebijakan redaksional yang dilakukan sehingga melahirkan konstruksi dalam muatan pemberitaan konflik PKB, kontroversi aliran Ahmadiyah, dan kontroversi film *Fitna*.

Metode analisis wacana kritis penelitian ini memandang wacana sebagai bentuk dari praktik sosial. Pandangan ini menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antar peristiwa diskusif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya.

Dalam penelitian ini, analisis wacana kritis dilakukan dengan dua tahap, yaitu :

1. Analisis Teks

Dalam melakukan analisis teks secara kritis, peneliti menggunakan dua model, antara lain :

- Analisis Isi

Analisis isi bergerak dalam teks level makro (isi dari suatu teks) dengan mengakui karakter inferensial dari pengkodean unit-unit tekstual ke dalam kategori-kategori konseptual.¹¹

Tahap ini dilakukan dengan membagi tema pada unit analisis yang diteliti, dan mengkategorisasikan narasumber yang diangkat dalam setiap pemberitaan.

- Analisis Teks Norman Fairclough

Analisis teks Fairclough menghubungkan antara teks pada level mikro dengan

⁹ John Obert Voll, *Politik Islam : Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, terj. Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hal 54-56.

¹⁰ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (Yogyakarta: LKIS, 2002), hal 93-108.

¹¹ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajidi (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hal 19.

konteks sosial yang lebih besar.¹² Dalam hal ini, teks dianalisis secara linguistik dengan melihat tiga masalah:

- 1) Representasi, dilihat dari bagaimana seseorang, kelompok, dan gagasan ditampilkan dalam kosakata, kalimat, kombinasi kalimat, dan rangkaian antarkalimat.
- 2) Relasi, merujuk pada analisis bagaimana konstruksi hubungan di antara wartawan dengan pembaca.
- 3) Identitas, merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas wartawan dan pembaca, serta bagaimana personal dan identitas ini hendak ditampilkan.

2. Analisis *Sociocultural Practice*

Tahapan ini berdasar pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada diluar mempengaruhi bagaimana wacana yang muncul di HU *REPUBLIKA*. Menurut Fairclough, ada tiga level analisis *sociocultural practice*, yaitu:

- Situasional.
Menganalisis unit analisis pemberitaan dengan memperhatikan aspek situasional ketika diproduksi.
- Institusional.
Institusional melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana.
- Sosial.
Kajian perubahan masyarakat yang dapat menentukan wacana yang muncul dalam media.

Tahap ini akan peneliti lakukan dengan menelusuri pustaka-pustaka yang relevan dengan tema penelitian.

Hasil Penelitian

A. Temuan Penelitian

1. Kecenderungan Umum Pemberitaan

a. Konflik Partai Kebangkitan Bangsa

Dalam pemberitaan konflik PKB terbitan 28 Maret-10 Mei 2008, peneliti menganalisis ada empat tema yang diangkat oleh *Republika*, yaitu :

No	Tema	Jumlah + Penempatan		Jumlah Total
		Headline	Non Headline	
1	Desakan mundur Muhaimin	1	3	4
2	Sikap kubu yang berkonflik	1	10	11
3	Dampak konflik	-	4	4
4	Tanggapan pihak luar terhadap konflik	1	5	6
	Jumlah	3	22	

¹² Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal 326

Selain itu, peneliti juga mengkategorikan narasumber yang terdapat pada setiap pemberitaan sebagai berikut :

No	Kategori	Posisi			Jumlah
		Kubu Gus Dur	Kubu Muhaimin	Netral	
1	Internal PKB	29	33	3	57
2	KPU	-	-	2	2
3	FKB DPR	-	-	4	4
4	NU	-	-	3	3
5	Pengamat Politik	-	-	8	8
	Jumlah	29	33	20	

Dari beberapa kategorisasi diatas, peneliti melihat bahwa *Republika* dalam berita konflik PKB memposisikan diri sebagai pihak yang netral. Hal ini terlihat dari tampilan cover both side di setiap tema yang ada, dan diperkuat dengan banyaknya pemberitaan yang mengutip dari kedua belah kubu, kemudian diakhir pemberitaan ditambah dengan respon dari pihak luar yang menginginkan penyelesaian konflik.

Selain itu, dalam menganalisis komposisi jumlah berita terlihat berita dikonstruksi untuk disajikan kepada khalayak tanpa menggiring kepada sebuah persepsi apapun. Dalam artian ini, *Republika* berkeinginan untuk membiarkan publik yang menilai tema berita.

Analisis narasumber berita konflik PKB memperlihatkan narasumber dari pihak luar konflik ditampilkan sebagai pihak yang memberikan solusi penyelesaian konflik. Disisi lain, lewat analisis narasumber *Republika* memunculkan dampak konflik, seperti ancaman eksistensi partai PKB dalam kancah politik, keikutsertaan pemilu 2009, serta perpecahan akar bawah partai. Hal ini memunculkan kesan bahwa konflik PKB tidak ada gunanya.

b. Kontroversi Ahmadiyah

Dalam pemberitaan kontroversi Ahmadiyah terbitan 10 April-16 Mei 2008, peneliti menemukan ada lima tema yang diangkat oleh *Republika*, yaitu :

No	Tema	Jumlah + Penempatan		Jumlah Total
		Headline	Non Headline	
1	Desakan pembubaran Ahmadiyah	-	2	2
2	Kesesatan Ahmadiyah	1	4	5
3	Ahmadiyah (Sejarah dan ajaran MGA)	-	6	6

No	Tema	Jumlah + Penempatan		Jumlah Total
		Headline	Non Headline	
4	Sikap terhadap keberadaan Ahmadiyah	4	5	9
5	SKB Ahmadiyah	2	4	6
	Jumlah	7	21	

Narasumber yang terdapat pada setiap pemberitaan peneliti kategorikan sebagai berikut :

No	Kategori	Posisi			Jumlah
		Pro	Kontra	Netral	
1	Ulama	-	7	-	7
2	Ormas Islam	-	30	-	30
3	JAI	11	-	-	11
4	Polisi	-	-	6	6
5	Pemerintah	-	2	22	24
6	MUI	-	11	-	11
7	LPPI	-	3	-	3
8	LBH	2	-	-	2
9	Masyarakat	-	6	-	6
10	Wantimpres	4	-	-	4
11	DPR	-	2	5	7
12	Parpol	-	3	7	10
	Jumlah	17	64	39	

Lewat analisis yang dilakukan, peneliti melihat bahwa *Republika* dalam berita tersebut memposisikan diri sebagai pihak yang kontra dengan keberadaan aliran Ahmadiyah ini di Indonesia dan menginginkan penyelesaian kasus ini.

Komposisi tema berita kontroversi Ahmadiyah peneliti analisis sebagai suatu pola yang dapat mengidentifikasi *Republika* sebagai pihak yang ingin membubarkan Ahmadiyah, dengan menggunakan cara-cara halus dan main aman (*safety*), yaitu dengan mengutip respon beberapa pihak perihal keberadaan jemaat Ahmadiyah di Indonesia.

Hal lain yang dianalisis oleh peneliti adalah perihal penempatan narasumber yang pro, kontra, dan netral terhadap keberadaan Ahmadiyah. Narasumber kontra disini porsi nya lebih besar dan berkompeten berbicara permasalahan agama daripada pro dan netral. Penempatan ini menguatkan analisis perihal keberpihakan *Republika* yang kontra dengan Ahmadiyah.

c. **Kontroversi Film Fitna**

Peneliti menemukan ada dua tema yang diangkat *Republika* dalam pemberitaan kontroversi film Fitna terbitan 23 Maret-8 April 2008, yaitu :

No	Tema	Jumlah + Penempatan		Jumlah Total
		Headline	Non Headline	
1	Kecaman film Fitna	4	6	10
2	Kajian film Fitna	-	3	3
	Jumlah	4	9	

Selain itu, peneliti juga mengkategorikan narasumber yang terdapat pada setiap pemberitaan berikut ini :

No	Kategori	Posisi			Jumlah
		Pro	Kontra	Netral	
1	Ormas Islam	-	18	-	18
2	Pemerintah	-	22	-	22
3	Ulama	-	8	-	8
	Jumlah	-	48	-	

Dari analisis yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa *Republika* lebih menempatkan diri sebagai pihak yang mengancam keberadaan film Fitna. Hal ini terlihat dari tema-tema yang diangkat, diantaranya kecaman film Fitna dan kajian film Fitna.

Republika dalam menempatkan posisinya sebagai bagian dari pihak yang mengancam ditampilkan lugas dan tidak bertele-tele. Hal ini terlihat dari judul-judul yang diangkat. Selain itu, konstruksi isi berita membuat kecaman tersebut seakan mempunyai legitimasi yang kuat karena berasal dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.

Dalam kategori narasumber, *Republika* mengambil narasumber yang berkompeten berbicara seputar Ahmadiyah, dan mampu untuk menginformasikan kepada khalayak perihal kontroversi film tersebut. Pada nantinya khalayak yang akan beropini terhadap kasus tersebut. Dari sini jelas, opini publik digiring ke arah kontra keberadaan film Fitna karena tidak ada satu pun narasumber pro keberadaan film Fitna.

2. Analisis Teks Fairclough

a. **Konflik Partai Kebangkitan Bangsa**

Analisis teks Fairclough pemberitaan konflik PKB terbitan 28 Maret-10 Mei 2008 rubrik laporan utama dan tajuk, menemukan bahwa *Republika* disini berusaha menampilkan kesan bahwa konflik ini tidak

menguntungkan kedua belah kubu yang berseteru, malah menimbulkan dampak negatif bagi eksistensi partai.

Hal ini terlihat dari keterkaitan tema-tema yang diangkat oleh *Republika*, serta penggunaan kosakata dan kalimat yang jarang menjadi legitimasi bagi salah satu kubu. *Republika* justru berusaha menyeimbangkan pernyataan-pernyataan dari kedua kubu dalam setiap pemberitaan, dan mencoba menampilkan respon dari pihak-pihak yang luar perihal dampak keberadaan konflik.

Lebih lanjut, pemberitaan konflik PKB dapat dikategorisasikan dalam beberapa level strategi wacana, yakni :

1). Representasi

Dalam menampilkan kosakata, *Republika* lebih banyak memakai kosakata yang jelas dan tegas, tanpa terkandung konotasi apapun. *Republika* juga banyak menggunakan kalimat yang mempunyai struktur yang tidak kompleks. Selain itu, tampilan *Republika* dalam mengkombinasikan kalimat lebih menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang ingin disampaikan.

Analisis tersebut mengindikasikan apa yang dilakukan *Republika* lebih menunjuk sesuatu yang telah terjadi, tanpa menggiring kesadaran pembaca terhadap peristiwa tersebut. Untuk rangkaian antarkalimat, *Republika* berusaha menempatkannya secara berimbang. Hal ini dilakukan sebagai bagian pihak luar yang hanya melihat konflik.

Temuan-temuan di atas terlihat dari beberapa contoh berikut ini :

- a). "Putusan Final jatuh untuk Muhaimin Iskandar"¹³
- b). ".....Choirie optimis masalah tersebut akan selesai jika Muhaimin sowan kepada Gus Dur.

Sementara itu, sekjen PKB, Lukman Edy menilai pencopotan Muhaimin melanggar konstitusi partai....."¹⁴

2). Relasi

Republika, dalam hal ini, lebih menempatkan hubungan dengan pihak yang berkonflik, dan disajikan secara berimbang. Hal ini mengidentifikasikan *Republika* tidak memihak salah satu kubu, dan mengkritisi konflik lewat sudut pandang pihak lain. Seperti terlihat dalam kombinasi kalimat "Belajar dari kasus PKB, juga konflik di sejumlah partai lainnya, masyarakat berharap partai menjadi garda terdepan dalam memberikan contoh kehidupan demokrasi"¹⁵

3). Identitas

Identitas wartawan ditampilkan sebagai bagian dari pihak yang cemas dengan keberadaan konflik, dan melihat konflik sebagai sesuatu yang

¹³ "Demokrasi," *Republika*, 28 Maret, 2008. 20

¹⁴ "Muhaimin Diminta Mundur," *Republika*, 28 Maret, 2008.

¹⁵ "Demokrasi," Loc.Cit.

tidak berguna. Hal ini berusaha ditampilkan untuk memberikan citra bahwa konflik PKB tidak selayaknya ditiru. Contoh analisis dapat dilihat dari judul berita "Kiai Sepuh Diminta Tengahi Konflik PKB"¹⁶

b. Kontroversi Ahmadiyah

Analisis teks Fairclough pemberitaan kontroversi aliran Ahmadiyah terbitan 10 April-16 Mei 2008 pada rubrik laporan utama dan tajuk, menemukan bahwa Ahmadiyah dipersepsikan sebagai sebuah ajaran yang sesat dan menyimpang dari ajaran Islam oleh *Republika*. Namun dalam mempersepsikan hal ini, *Republika* melakukannya secara tidak langsung dan frontal. Lebih lanjut, kesesatan disini ditampilkan *Republika* bukan hanya sekedar wacana, namun juga disertai tindakan konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Pemberitaan kontroversi aliran Ahmadiyah juga dapat dikategorisasikan dalam beberapa level strategi wacana, yakni :

1). Representasi

Tampilan kosakata lebih banyak mengandung konotasi negatif, sedangkan tampilan kalimat banyak berbicara perihal tindakan terhadap keberadaan Ahmadiyah. Untuk kombinasi kalimat, kebanyakan berupa penjasas, penyebab, maupun prasyarat untuk menguraikan tema berita.

Analisis tersebut dapat menggiring asumsi khalayak yang melahirkan tindakan dan tentu berimplikasi bagi parajemaat Ahmadiyah.

Rangkaian kalimat banyak berisi pernyataan yang menguatkan indikasi penyimpangan Ahmadiyah dan pemecahan solusi keberadaannya.

Temuan di atas dapat dilihat dari beberapa contoh berikut ini :

a). "Ahmadiyah merupakan agama tersendiri"¹⁷

b). "Tak ada jalan lain, Bapak Presiden wajib membubarkan Ahmadiyah," kata Habib Rizieq. Selain Habib Rizieq, tokoh FUI lainnya yang hadir, antara lain Abu Jibril dari MMI, Fikri Bareno dari Al Ittihadiyah, serta Habib Idrus Jamalullail."¹⁸

2). Relasi

Relasi terkait dengan pihak kontra Ahmadiyah. Dalam hal ini, *Republika* tidak sekedar melihat Ahmadiyah pada dataran luarnya, namun mencoba melihat dan membuka wacana terhadap ajaran ini. Seperti terlihat dalam kalimat "Jadi, dalam peraturan itu, Ahmadiyah ditegaskan bukan Islam, tetapi mereka tetap memiliki hak-haknya sebagai warga negara, kata Yusril"¹⁹

¹⁶ "Kiai Sepuh Diminta Tengahi Konflik PKB," *Republika*, 29 Maret, 2008.

¹⁷ "Ahmadiyah dan Kebebasan Beragama," *Republika*, 17 April, 2008.

¹⁸ "Ahmadiyah Bukan Masalah Khilafiyah," *Republika*, 21 April, 2008.

¹⁹ "Ahmadiyah Agama Tersendiri," *Republika*, 21 April, 2008. 23

3). Identitas

Wartawan lebih diidentitaskan bagian dari masyarakat yang menginginkan penyelesaian kasus Ahmadiyah. Bentuk penyelesaian ini lebih cenderung untuk membubarkan Ahmadiyah. Contohnya dalam salah satu judul yang diangkat, yaitu "Ahmadiyah Dinilai Menyimpang"²⁰

c. Kontroversi Film *Fitna*

Dari rubrik laporan utama dan tajuk pemberitaan kontroversi film *Fitna* terbitan 23 Maret-8 April 2008, peneliti menemukan *Republika* berusaha menampilkan kecaman beberapa pihak terhadap kehadiran film *Fitna*. Hal ini memposisikan *Republika* sebagai bagian dari pihak yang mengecam kehadiran film *Fitna*.

Disisi lain, *Republika* mencoba menggiring wacana publik dalam merefleksikan keberadaan film *Fitna*, khususnya umat Islam, sehingga dapat menyikapinya secara bijak.

Dalam hal ini, dapat juga ditarik kesimpulan pada tiap-tiap tema perihal strategi wacana yang dilakukan wartawan, antara lain :

1). Representasi

Kosakata dan kalimat yang ditampilkan lebih banyak mengandung proses mental terhadap kehadiran film *Fitna*. Hal ini ditampilkan untuk membuat pembaca turut melakukan tindakan terkait keberadaan film *Fitna*. Sedangkan kombinasi kalimat yang ditampilkan dapat menguraikan lebih detail perihal tema, sehingga pembaca sadar dan paham kenapa film *Fitna* dikecam.

Untuk rangkaian kalimat, lebih melihat kecaman terhadap Film *Fitna* dari berbagai kalangan. Hal ini dilakukan *Republika* untuk menggiring kesadaran pembaca bahwa kecaman terhadap film *Fitna* didukung banyak pihak. Temuan di atas terlihat dari beberapa contoh berikut :

a). "Fitna Menuai Kecaman"²¹

b). "Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga mengimbau umat Islam tetap menyikapi masalah tersebut dengan bijak. OKI meminta umat Islam tidak terjebak pada tindakan kekerasan"²²

2). Relasi

Republika lebih menempatkan hubungan dengan pihak yang mengecam film *Fitna*. Selain itu, *Republika* berusaha melihat dampak keberadaan film *Fitna*.

Hal ini terlihat dari kalimat "Kalau muslim bersatu boikot produk Belanda, Negara itu akan bangkrut karena yang memboikot banyak sekali"²³

²⁰ "Ahmadiyah Dinilai Menyimpang," *Republika*, 17 April, 2008.

²¹ "Fitna Menuai Kecaman," *Republika*, 29 Maret, 2008.

²² "Wildes „Fitna" Bisa Diajukan ke Pengadilan," *Republika*, 30 Maret, 2008.

²³ "Mahathir: Boikot Produk Belanda," *Republika*, 31 Maret, 2008.

3). Identitas

Wartawan diidentitaskan sebagai bagian dari pihak yang mengancam film Fitna. Selain itu, wartawan juga peduli terhadap dampak yang diakibatkan film Fitna, sehingga menghimbau pihak-pihak untuk bijak dalam merespon film Fitna. Seperti terlihat dalam penggunaan judul "Menyikapi film Fitna".²⁴

Pembahasan

Penelitian ini melihat bahwa peran ideologi keislaman yang diusung *Republika* sangat kental terasa dalam kemasan pemberitaan konflik PKB, kontroversi Ahmadiyah, dan kontroversi film Fitna. Hal ini terlihat dari tampilan isi berita termasuk pemakaian kosakata dan penyusunan kalimat.

Pada dasarnya, konstruksi berita yang ditampilkan *Republika* telah ditata sedemikian rupa sehingga mengalami beberapa tahapan dalam kemunculannya sebagai berita yang akan dikonsumsi oleh khalayak. Penataan ini sendiri tidak lepas dari faktor kepentingan yang turut mempengaruhi berita yang disampaikan kepada khalayak.

Proses konstruksi ini melewati kebijakan manajerial yang kompleks dalam sebuah media. Kebijakan ini disebut kebijakan redaksional, yang diterapkan oleh manajemen redaksi dan berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan individu yang terlibat didalamnya sehingga sesuai dengan apa yang menjadi tujuan organisasi media.

Perihal proses penataan diatas, teori yang tepat adalah teori komunikasi massa dengan model penataan agenda (agenda setting). Model penataan agenda dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan ditampilkannya. Secara selektif, "gatekeepers" seperti penyunting, redaksi, bahkan wartawan sendiri menentukan mana yang pantas diberitakan dan mana yang harus disembunyikan. Setiap kejadian atau isu diberi bobot tertentu dengan panjang penyajian dan cara penonjolan.

Konstruksi berita lewat penataan agenda tersebut, tidak terlepas dari pengaruh ideologi yang bermain pada suatu media. Pada dasarnya ideologi dilatarbelakangi oleh pengaruh institusi yang menaungi media dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu lewat keberadaan media tersebut. Ideologi kemudian diangkat, diberi legitimasi, dan didistribusikan secara persuasif oleh media kepada khalayak.

Pendirian *Republika* pada dasarnya bersifat idealis, artinya ia didirikan dengan tujuan politis-ideologis. *Republika* dibangun oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). ICMI merupakan bentuk akomodasi negara terhadap keberadaan umat Islam dengan mayoritas penduduknya di Indonesia, dan oleh para pendirinya dijadikan sebagai mediasi yang berperan dalam mendefinisikan kebijakan negara.

²⁴ "Menyikapi Film Fitna," *Republika*, 31 Maret, 2008. 26

Dalam pandangan peneliti, hal ini menjadikan ICMI sebagai wadah propaganda pemerintah dalam menggali potensi massa Islam lewat para cendekiawannya. Rezim Soeharto yang otoriter berkeinginan membatasi pergerakan umat Islam dalam berpolitik, yang pada nantinya diasumsikan dapat menjadi kekuatan alternatif untuk menjatuhkan pemerintahannya.

Nuansa ideologi Islam dalam berita konflik PKB terlihat dengan independensi *Republika* yang tidak memihak salah satu kubu yang berkonflik, dan menampilkan konflik PKB sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya menjadi contoh partai pada era reformasi saat ini. Nuansa ini seakan mendeskripsikan *Republika* bersikap kritis dalam menanggapi konflik PKB. Namun, posisi *Republika* terlihat sebagai sebuah keberpihakan yang tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar.

Secara politis, *Republika* dilatarbelakangi organisasi ICMI yang konservatif terhadap perubahan zaman, memiliki perbedaan corak ideologi dengan PKB, dengan latar belakang NU, yang berideologi Islam tradisional.

Dalam berita kontroversi Ahmadiyah, nuansa ideologi Islam terlihat dari bagaimana *Republika* lewat tampilan pemberitaannya mendeskripsikan Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang dari Islam. Di sisi lain, *Republika* juga menginginkan suatu bentuk penyelesaian yang konkret dan tegas terkait permasalahan Ahmadiyah yang berlarut-larut di Indonesia.

Posisi *Republika* dalam konstruksi berita kontroversi Ahmadiyah ini dilatarbelakangi faktor kepentingan yang bermain dalam kebijakan redaksional. Kepentingan ini menafsirkan Ahmadiyah sebagai aliran yang telah merusak isi Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya lantas merupakan suatu hal yang patut untuk diluruskan sesuatu akidah Islam yang benar.

Untuk berita kontroversi film *Fitna*, nuansa ideologi Islam *Republika* terlihat dari ketegasan sikap *Republika* yang turut mengecam kehadiran film *Fitna*. Di sini bentuk kecaman ditampilkan lewat pernyataan dan tindakan pihak-pihak serta umat muslim di seluruh dunia.

Dengan tolak ukur hegemoni peradaban barat, *Republika* juga menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat timur yang kontra dengan keberadaan peradaban barat yang liberal. Lewat keberadaan film *Fitna*, *Republika* menampilkan liberalisme bangsa barat sebagai sesuatu yang telah merusak tatanan kerukunan umat beragama.

Berdasarkan analisis di atas, corak ideologi Islam yang diusung *Republika* dalam ketiga pemberitaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ideologi Islam konservatif. Menurut John Obert Voll, Islam konservatif merupakan salah satu bentuk tindakan dasar Islam yang mempertahankan sistem hukum Islam dengan bentuk kecurigaan terhadap pembaharuan, untuk mendorong kata kompromi dalam bentuk adaptasionis dengan keterikatannya dengan apa yang bisa diterima secara Islami.

Penutup

Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa nuansa ideologi Islam dalam kebijakan Redaksional *Republika* pada ketiga unit pemberitaan yang dianalisis dapat dikategorisasi sebagai bentuk ideologi Islam konservatif atau moderat. Hal ini dapat disimpulkan dari analisis yang dilakukan oleh peneliti.

Analisis isi berita konflik Partai Kebangkitan Bangsa terbitan 23 Maret-10 Mei 2008 menunjukkan tampilan netral *Republika* dalam konstruksi pemberitaan ini. Konflik PKB disini ditampilkan *Republika* sebagai sesuatu yang akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Sedangkan, analisis teks Fairclough memperlihatkan *Republika* menampilkan kesan konflik ini tidak menguntungkan kedua belah kubu, malah menimbulkan dampak negatif eksistensi partai.

Untuk pemberitaan kontroversi aliran Ahmadiyah terbitan 10 April-16 Mei 2008, analisis isi memperlihatkan *Republika* memposisikan diri sebagai pihak yang kontra Ahmadiyah dengan mempersepsikan Ahmadiyah sebagai aliran yang sesat. Hal yang sama juga terlihat dalam analisis teks Fairclough, dimana *Republika* juga dapat dianalisis mempersepsikan Ahmadiyah sebagai sebuah ajaran yang sesat dan menyimpang dari ajaran Islam.

Analisis isi pemberitaan film Fitna terbitan 23 Maret-8 April 2008, *Republika* lebih bersikap mengecam keberadaan film tersebut. Tampilan berita juga dapat menggiring kesadaran khalayak kearah persepsi kritis. Begitu juga kesimpulan pada analisis teks Fairclough, dimana *Republika* berusaha menampilkan kecaman beberapa pihak yang kontra dengan kehadiran film Fitna. Kecaman ini datang dari pihak yang mempunyai kredibilitas dan merupakan tokoh sentral publik, sehingga seakan memiliki legitimasi tinggi.

Dalam hal ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini kurang mendetail dalam menjabarkan nuansa ideologi Islam dalam kebijakan redaksional HU *REPUBLIKA* karena masih dapat dikaji lebih mendalam lewat historikal organisasi pers *Republika* dan wawancara narasumber.

Oleh karena itu, peneliti memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam kajian ideologi keislaman yang berperan dalam kebijakan redaksional media cetak. Selain itu, peneliti memberikan masukan kepada *Republika* untuk tidak sekedar memberikan wacana kepada khalayak, namun juga dapat menjadi media pembelajaran dan media informasi yang sesuai dengan kaidah jurnalistik.

Daftar Pustaka

- Aditya, Dandi. "Studi Ideologi Media." <http://digilib.itb.ac.id> (akses 14 Mei 2008)
- Alam, Gigih Sari. "Sejarah Berdirinya Pers Islami dan Harian *Republika*."
- Deni. "Konstruksi Berita di Media Massa." <http://deniborin.multiply.com> (akses 14 Mei 2008).
- Eriyanto. 2001. Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS.
- _____. 2002. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta: LKiS.

- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa; Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Jiun. "Kenaikan Harga BBM dalam Kemasan Jawa Pos dan Kompas." <http://digilib.petra.ac.id> (akses 2 Mei 2008).
- <http://gigihserialam.blogspot.com> (akses 18 Juni 2008).
- Krippendorff, Klaus, 1991. Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi, terj. Farid Wajidi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pareno, Sam Abede. 2003. *Manajemen Berita: Antara Idealisme dan Realita*. Surabaya: Papyrus,.
- Qardhawi, Yusuf. 1985. *Kerangka Ideologi Islam*. Bandung: Risalah.
- Voll, John Obert. 1997. *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- "Ahmadiyah Agama Tersendiri," *Republika*, 21 April 2008.
- "Ahmadiyah Bukan Masalah Khilafiyah," *Republika*, 21 April 2008.
- "Ahmadiyah dan Kebebasan Beragama," *Republika*, 17 April 2008.
- "Ahmadiyah Dinilai Menyimpang," *Republika*, 17 April 2008.
- "Company Profile." <http://republika.co.id> (akses 25 November 2007).
- "Demokrasi," *Republika*, 28 Maret 2008.
- "Fitna Menuai Kecaman," *Republika*, 29 Maret 2008.
- "Kiai Sepuh Diminta Tengahi Konflik PKB," *Republika*, 29 Maret 2008.
- "Latar Belakang ICMI." www.icmi.or.id (akses pada 12 September 2008).
- "Mahathir: Boikot Produk Belanda," *Republika*, 31 Maret 2008.
- "Menyikapi Film Fitna," *Republika*, 31 Maret 2008.
- "Muhaimin Diminta Mundur," *Republika*, 28 Maret 2008.
- "Sejarah PKB." <http://www.dpp-pkb.org> (akses pada 12 September 2008).
- "Wildes, Fitna" Bisa Diajukan ke Pengadilan," *Republika*, 30 Maret 2008.

